

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Artikel ini merupakan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 yang memberikan jeda lima tahun kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi yaitu; Mahkamah menilai calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana, namun tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji. Tak sedikit mereka mengulang kembali tindak pidana yang sama—dalam hal ini, tindak pidana korupsi. Hal ini berakibat makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Atas dasar itu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang dasar permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan dampak setelah dikeluarkannya putusan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Dari Tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pemohon untuk menambah masa tunggu mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah karena waktu tersebut dinilai cukup untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : Mahkamah Konsitusi, Mantan Narapidana, Kepala Daerah

ABSTRACT

This article discusses the political rights of former inmates to run for candidates for a mayor. This article is the result of an analysis of the decision of the Constitutional Court. No. 56/PUU-XVII/2019 which gives five years break for former inmates to run for candidates for a mayor. Basic consideration (*ratio decidendi*) of the decision of the Constitutional Court namely; The Court considers that a candidate for regional head who has served a sentence, but who was not given enough time to adapt and prove himself in society, turns out to be trapped back in dishonorable behavior. Not a few of them have repeated the same crime — in this case, the criminal act of corruption. This results in being further away from the goal of presenting leaders who are clean, honest and with integrity. On that basis, candidates for regional head who have completed their criminal period are required to wait 5 years to be able to apply to become candidates for regional head. This is except for candidates for regional heads who have committed crimes of negligence and political crimes in the sense of an act which is declared a criminal act in positive law only because the perpetrator has a different political view from the regime in power.

This paper aims to understand the basis for the Constitutional Court petition Number 56 / PUU-XVII / 2019 and the impact after the issuance of the decision.

The approach method used is normative juridical with the specifications of analytical descriptive research. Types and sources of data used are primary data and secondary data and data collection is carried out by means of document study. Data collection techniques were carried out namely library research with data analysis using qualitative methods.

From this paper, it can be concluded that the Constitutional Court granted the applicant's request to increase the waiting period of ex-convicts to run for Regional Head because this time is considered sufficient to provide a deterrent effect from repeating his actions.

Keywords : Constitutional Court, Former Inmate, Mayor Candidate